

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA BERGULIR BAGI
USAHA KECIL DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI DESA PAIT KECAMATAN LONG IKIS KABUPATEN
PASER**

Razib Daly Indra Nugraha

**eJournal Ilmu Pemerintahan
Volume 2 Nomor 1
2014**

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA BERGULIR BAGI USAHA KECIL DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA PAIT KECAMATAN LONG IKIS KABUPATEN PASIR

RAZIB DALY INDRA NUGRAHA¹

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi kebijakan dana bergulir bagi usaha kecil dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menghambat kebijakan dana bergulir bagi usaha kecil di Desa Pait Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui key informan dengan wawancara langsung dan observasi serta data sekunder melalui dokumen yang berkaitan dan diperlukan dalam penelitian ini.

Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan, Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser.*

Pendahuluan

Dalam era reformasi yang sedang berjalan hendaknya paradigma pembangunan sudah saatnya untuk dirubah. Pembangunan harus lebih ditunjuk langsung untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir orang atau kelompok. Pembangunan harus dikembangkan dengan berbasiskan ekonomi domestik pada daerah Kabupaten/Kota. Disamping itu, tingkat kemandirian harus tinggi, adanya kepercayaan diri dan kesetaraan, meluasnya kesempatan berusaha dan pendekatan, partisipatif, adanya persaingan sehat, keterbukaan/demokrasi, pemerataan yang berkeadilan serta didukung dengan industri yang berbasis sumber daya alam (*resources based industry*). Hakekatnya pembangunan menurut Abimanyu (1985:3) adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Ini berarti bahwa pembangunan mencakup: pertama, kemajuan lahiriah seperti pangan, sandang perumahan dan lain-lain; kedua, kemajuan batiniah seperti

¹ Materi artikel ini berasal dari skripsi yang ditulis oleh pengarang (Razib, Prodi IP Fisip Unmul).Mahasiswa tingkat akhir pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:razib.daly@yahoo.com

pendidikan, rasa aman, rasa keadilan, rasa sehat; dan ketiga, kemajuan yang meliputi seluruh rakyat sebagaimana tercermin dalam perbaikan hidup berkeadilan sosial.

Todaro (2000:21) mengemukakan bahwa inti dari pembangunan adalah kecukupan (*sustenance*) yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar, jadi diri (*self esteem*) yaitu menjadi manusia seutuhnya, kebebasan (*freedom*) dari sikap menghamba yaitu kemampuan untuk memilih. Kompleksnya permasalahan masyarakat dan pemerintah menurut Rondinelli (1990:54), pengambilan keputusan sentralistik menjadi tidak efisien, mahal dan sulit dilaksanakan, oleh karena itu sekarang bagaimana pemerintah (daerah) mampu mengatur dan menyediakan berbagai ragam pelayanan publik, desentralisasi, demokrasi dan pemberdayaan dijadikan pemilihan guna mengeliminir kekurangan-kekurangan sistem pemerintahan yang sentralistik. Di Indonesia upaya tersebut dilakukan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang memberikan peluang yang sangat besar kepada daerah untuk mengembangkan dan mengolah pertumbuhan daerah sebagai basis perekonomian.

Krisis ekonomi menyebabkan kemunduran berbagai kegiatan ekonomi rakyat, produksi, distribusi dan konsumsi yang selanjutnya berdampak pada meningkatnya pengangguran dan penduduk miskin. Di kabupaten Pasir sebagai dampak krisis ekonomi banyak para petani/nelayan (usaha kecil) mengalami kemunduran/kemacetan usaha, bahkan tidak mampu melanjutkan kegiatan usahanya/menjadi miskin karena tidak memiliki dana.

Dalam upaya menaggulangi dampak krisis ekonomi, pemerintah mengambil kebijaksanaan dan langkah-langkah dalam bentuk program Jaring Pengaman Sosial (JPS) atau *Social Safety Net (SSN)* yang dilaksanakan oleh berbagai sektor yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat, seperti bidang pengembangan usaha, program padat karya, Operasi Pasar Khusus (OPK) beras, program-program JPS sektor pertanian, pendidikan dan kesehatan. Dalam perkembangannya program JPS mengalami perbaikan bentuk kegiatan, Pemberdayaan Daerah Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE) yang dilaksanakan sejak tahun 1998-1999 merupakan salah satu program JPS penyelamatan (*rescue*) dalam bentuk bantuan langsung kepada masyarakat miskin dan yang jatuh miskin akibat krisis ekonomi.

Selain program PDM-DKE yang merupakan kebijakan nasional pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten Paser dalam upaya membantu masyarakat miskin sebagai akibat dampak krisis ekonomi dan dalam rangka pembangunan ekonomi daerah telah mengambil kebijakan penyaluran kredit/dana bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan bagi usaha kecil.

Program penyaluran kredit/dana bergulir bagi usaha kecil sebagai salah satu upaya pembangunan ekonomi daerah tidak akan berhasil tanpa disertai aspek immaterial seperti untuk bebas dari ketergantungan. Sebagai

upaya pemberdayaan tentunya program penyaluran kredit/dana bergulir bagi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam merencanakan, menentukan pilihan dan pelaksanaan program akan menumbuhkan *empowerment* masyarakat.

Ledgerwood (1999, hal. 1) mendefinisikan keuangan mikro sebagai penyediaan layanan keuangan untuk masyarakat berpendapatan rendah, termasuk pedagang kecil, pedagang kaki lima, petani kecil, penjual jasa (penata rambut, penarik becak), tukang dan produsen kecil.

Dari uraian tersebut diatas itulah maka penelitian tertarik untuk meneliti bagaimanakah pelaksanaan program penyaluran kredit/dana bergulir bagi usaha kecil dalam upaya penanggulangan kemiskinan tersebut.

Gagasan pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan dana bergulir mulai di pikirkan ketika muncul kesadaran bahwa masyarakat miskin itu bukan *the have not* melainkan *the have little*. Bahwa mereka adalah *economically active poor* yang lebih memerlukan aksesibilitas pada service provider (dalam hal ini lembaga keuangan) daripada belas kasihan. Dan bahwa upaya pembangunan masyarakat seutuhnya menjadi lengkap apabila memiliki manfaat ekonomi bagi anggotanya.

Program penyaluran kredit/dana bergulir merupakan kebijakan pemerintah kabupaten paser dalam rangka meningkatkan taraf hidup, masyarakat, menciptakan keberdayaan masyarakat miskin/petani miskin. Keberhasilan penanggulangan kemiskinan di tandai dengan penduduk miskin yang terjadi sejahtera dan mandiri melalui penciptaan kesempatan kerja yang meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan.

Kerangka Dasar Teori

Implementasi Kebijakan

Implementasi diartikan dalam kamus Webster (dalam Solichin, 1999:50) dengan mengartikannya sebagai "mengimplementasikan" yang mempunyai pengertian *to provide for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Berdasarkan pandangan ini maka implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan, perintah eksekutif atau Dekrit Presiden).

Model Implementasi Kebijakan

Model implementasi diperlukan setiap perumus kebijakan yang menginginkan setiap kebijakan berhasil. Implementasi akan berhasil bila mengakui model suatu tertentu dan akan lebih berhasil lagi apabila menggunakan model lebih dari satu. Terkait dengan model implementasi ada

hal yang perlu diperhatikan, yaitu: analisis implementasi, bagaimana sesuatu yang kita buat atau desain implementasi bisa menghasilkan tujuan maksimal.

Pendekatan-pendekatan Implentasi Kebijakan

Suatu kebijakan akan selalu terbuka kemungkinan terjadi perbedaan antara apa yang direncanakan dengan apa yang senyatanya dicapai sebagai hasil atau prestasi dari pelaksana kebijakan. Untuk menunjang keberhasilan dari implementasi kebijaksanaan tersebut, berbagai pendekatan harus dilakukan. Menurut Solichin (1997:98) mengatakan untuk mengimplementasikan kebijakan dapat digunakan beberapa pendekatan yang menyadarkan diri pada pendekatan dari atas atau *top down* antara lain : pendekatan struktural (*structural approach*), pendekatan prosedural dan manajerial (*procedural and managelal approach*), pendekatan keprilakuan (*behavioural apporoach*), dan pendekatan polotik (*politikal apporoach*).

Usaha Kecil

Pendapat para pakar mengenai usaha. usaha adalah energi yang dipindahkan dari atau ke benda melalui gaya yang bekerja pada benda tersebut. Energi yang ditransfer ke benda adalah energi yang positif. Sedangkan energi yang ditransfer dari benda keluarnya adalah sebuah kesepakatan penamaan saja.

Kemiskinan

Konferensi Dunia untuk Pembangunan Sosial telah mendefinisikan kemiskinan sebagai berikut: Kemiskinan memiliki wujud yang majemuk, termasuk rendahnya tingkat pendapatan dan sumber daya produktif yang menjamin kehidupan berkesinambungan; kelaparan dan kekurangan gizi; rendahnya tingkat kesehatan; keterbatasan dan kurangnya akses kepada pendidikan dan layanan-layanan pokok lainnya.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan

Menurut Hadari (2003) terdapat Faktor-faktor yang mempengaruhi suatu keputusan atau juga suatu kebijakan di dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan yaitu ; nilai-nilai, kondisi yang menekan, insitusi, tingkat ketidakpastian alternatif yang di pilih, kialitas data, pertimbangan kualitas imformasi politik dan keperibadian dan intelegensi.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan

mendiskripsikan serta menganalisis data yang telah di peroleh dan selanjut nya di jabarkan dalam bentuk penjelasan yang sebenar nya.

Dalam menentukan *key informan* adalah prinsip dasar untuk memperoleh informasi yang kaya dan mendalam menjadi pedoman dalam strategi penarikan sampel riset kualitatif. (Daymon, 2008:246) “*purposive sampling*” adalah pemilihan sampel berdasarkan karkteristik yang dianggap mempunyai sangkut pautnya dengan karakteristik polpulasi yang sudah diketahui sebelumnya.

Analisis data dalam penelitian ini, dimulai sejak data diperoleh dari lapangan kemudian dituangkan dalam tulisan (diklasifikasikan), dan selanjutnya dianalisis berdasarkan Lofland & Lofland (1984:131:147) yaitu dilakukan secara terus menerus sepanjang waktu selama penelitian berlangsung. Penelitian yang tidak segera melakukan analisis sejak dini oleh Glaser (dalam Alwasilah, 2002:158) dikatakan tidak akan memperoleh theritical sensitivity yakni kepaakan teoritis terhadap data yang dikumpulkan.

Implementasi Kebijakan Kredit

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai dengan adanya pengangguran dan keterbatasan yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan. Masyarakat umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya pada kegiatan ekonomi, sehingga semakin tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi. Masyarakat miskin tidak mempunyai pendapatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum seperti kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perubahan dan pendidikan, yang diperlukan untuk dapat hidup dan bekerja layak.

Kebijakan kredit bagi penduduk miskin memang tidak bisa di lepaskan sepenuhnya dari subsidi. Kebijakan penting lainnya untuk penanggulangan kemiskinan adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keluarga miskin dengan keluarga tenaga kerja tidak terdidik mempunyai kemampuan yang terbatas untuk memasuki pasar tenaga kerja, baik di kegiatan yang mempunyai keterkaitan erat dengan pertanian (argo industri) maupun di sektor non pertanian. Dengan demikian mereka akan tetap tidak mampu (dengan kekuatan sendiri) untuk beranjak dari kemiskinan. Meningkatnya kualitas tenaga kerja maka kapasitas produksinya akan meningkat dan potensinya untuk mendapatkan pekerjaan dengan upah yang lebih baik menjadi semakin besar.

Secara kuantitatif pembangunan ekonomi memang memberikan kemajuan yang pesat. Diskuskus yang berkembang hingga pertengahan tahun 1997 adalah diskursus tentang keberhasilan pembangunan, khususnya pembangunan bidang ekonomi di Indonesia. Namun setelah boom keberhasilan itu, pertengahan tahun 1997 hingga sekarang kondisi perekonomian jatuh

merosot dengan sangat memprihatinkan, bahkan dalam jangka waktu 1 tahun jumlah penduduk miskin semakin membengkak menjadi 39,1 %. Berbagai fenomena pembangunan ekonomi tersebut akhirnya menimbulkan gejala “anti pembangunan”.

Kemudian muncul berbagai ketimpangan dan desparitas di dalam masyarakat. Kendati pun kondisi kemiskinan secara naluriah selalu ingin dihindari oleh negara-negara. Namun kondisi kemiskinan tersebut, diharapkan atau tidak, pasti terdapat di setiap pelosok umat manusia atau pemerintahan suatu negara-bangsa. Akhirnya, kemiskinan dijadikan sebagai topik problema pembahan, sehingga begitu banyak konsepsi mengartikan kondisi kemiskinan tersebut. Individu, masyarakat, daerah, bahkan suatu negara juga di konsepsikan sebagai “miskin”. Namun jika “aktor” kemiskinan tersebut ditanyakan akan kondisi yang dialami, maka sudah dapat dipastikan tidak ada satupun aktor yang menyatakan dirinya miskin. Akibatnya berbagai pendekatan, strategi maupun kebijakan yang mencoba mengentaskan kemiskinan tidak ada satu pun yang memberikan jalan keluar yang memadai.

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah meningkatkan kemampuan dan meningkatkan kemandirian masyarakat. Dalam kerangka pemikiran ini, upaya memberdayakan masyarakat yang ditawarkan oleh Gunawan Sumodiningrat (1996:16) dapat dilihat dari 3 (tiga) sisi. Pertama, pemberdayaan dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Setiap anggota masyarakat secara alamiah memiliki potensi yang dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki menuju kehidupan yang lebih baik. Kedua, pemberdayaan untuk memperkuat potensi ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan tarif pendidikan dan derajat kesehatan serta akses terhadap sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi lapangan kerja dan pasar. Ketiga, pemberdayaan melalui pengembangan melalui pengembangan ekonomi rakyat berarti berupaya melindungi untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta menciptakan kebersamaan dan kemitraan antara yang sudah maju dengan yang belum berkembang. Secara khusus perhatian harus diberikan dengan pemihakan dan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan ekonomi rakyat, yaitu ekonomi usaha kecil termasuk koperasi, agar tidak tertinggal jauh dan justru dapat memanfaatkan momentum globalisasi pertumbuhannya.

Dalam konteks pelaksanaan dan tinjauan administrasi, pemberdayaan masyarakat dalam rangka pelaksanaan program pembangunan harus mempunyai beberapa persyaratan pokok (Kartasmita, 1996:27), yaitu : *pertama*, kegiatan yang dilaksanakan harus terarah bagi atau menguntungkan masyarakat yang lemah, keterbelakangan dan tertinggal, *kedua*, pelaksanaan

dilakukan oleh masyarakat sendiri, dimulai dari pengenalan apa yang dilakukan, *ketiga*, karena masyarakat yang lemah sulit untuk bekerja sendiri-sendiri akibat kekurangan keberdayaannya, maka upaya pemberdayaan masyarakat menyangkut pula pengembangan kegiatan usaha bersama (kooperatif), dalam kelompok yang dapat dibentuk atas dasar wilayah tempat tinggal, *keempat*, menggerakkan partisipasi yang luas dari masyarakat untuk turut serta membantu dalam rangka kesetiakawanan sosial, disini termasuk lembaga swadaya masyarakat setempat, perguruan tinggi dan lain sebagainya.

Dari pengalaman pembangunan selama ini, makin jelas banyak persoalan yang menghambat dan dapat mengagalkan pembangunan adalah dalam pelaksanaan. Oleh karena itu dalam ilmu administrasi berkembang pula penelitian-penelitian yang khusus mendalami masalah pelaksanaan (*implementation*) sebab betapapun baiknya perencanaan tidak akan lebih baik daripada hasil pelaksanaan. Masih beberapa aspek yang menyangkut masyarakat dan aparat pemerintah (birokrasi) sebagai pelaksana pembangunan. Masalah besar yang di hadapi dalam upaya pemberdayaan masyarakat adalah ketidaktahuan (*ignorance*) di kalangan masyarakat itu sendiri.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya merupakan unsur yang sungguh penting dalam hal ini. Dengan dasar pandang yang demikian, maka pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan dan pengalaman demokrasi.

Program pelaksanaan penyaluran kredit/dana bergulir merupakan proses pemberdayaan dan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan meningkatkan pendapatannya. Dengan kebijakan kredit dari penduduk miskin ini diharapkan terjadinya perubahan kebijakan pembangunan ke arah pembangunan ekonomi sebenarnya yang bertujuan membangun fundamen ekonomi rakyat agar daya belinya meningkat kembali. Dengan upaya tersebut diharapkan akan meningkatkan *bargaining position* pasar nasional, agar ekonomi nasional tidak bergantung pada *global market* yang berwatak eksploratis.

Dari uraian di atas maka dapatlah dikemukakan verifikasinya bahwa implementasi kebijakan kredit/dana bergulir bagi usaha kecil dalam upaya penanggulangan kemiskinan dalam rangka pembangunan ekonomi di Kabupaten Pasir dilakukan dengan tujuan membangun fundamen ekonomi rakyat agar daya belinya meningkat, sehingga dengan upaya ini akan dapat meningkatkan *bargaining position* pasara nasional.

Pelaksanaan Penyaluran Kredit/Dana Bergulir

Program penyaluran kredit/dana bergulir kepada masyarakat dengan dana Pemerintah Kabupaten Pasir implementasinya melalui proyek yang

dialokasikan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Dinas Perikanan dan Sumber Daya Kelautan, serta Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

Dana yang telah dialokasikan melalui proyek tersebut kemudian ditempatkan/disetorkan ke Bank Muamalat yang ditranfer dari Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Pasir sebagai Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Pasir. Untuk lebih jelasnya proses penetapan dana bergulir dapat dilihat pada gambar berikut :

Proses Penetapan Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Pasir

Proses Penyaluran Dana Bergulir

Program penyaluran kredit/dana bergulir kepada masyarakat dengan dana Pemerintah Kabupaten Pasir dalam implementasinya melalui proyek masing-masing lembaga teknis (Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi; Dinas Perikanan dan Sumber Daya Kelautan, serta Dinas Pertanian Tanaman Pangan) dan disosialisasikan oleh penyuluh dari masing-masing dinas. Sedangkan penyaluran kredit/dana bergulir yang dananya dari bantuan Total Final, Unocal dan Basis langsung ditangani oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Pasir

Kegiatan usaha yang mendapat bantuan dana bergulir ini tergantung studi kelayakan proposal yang diajukan oleh petani/peternak/nelayan/industri rumah tangga kelompok atau perorangan dengan pembinaan dan rekomendasi PPL atau petugas teknik atau tim teknis daerah dengan persyaratan yang ditentukan oleh lembaga teknis sebagai penanggung jawab. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh salah satu PPL yang memberikan keterangan sebagai berikut :“kelompok-kelompok yang menjadi binaannya saat ini mengalami kekurangan/kesulitan dana, sehingga tidak dapat melanjutkan usahanya atau mengembangkan usahanya, setelah diberi penjelasan dan pengarahan mengenai kegiatan usahanya sesuai dengan kemampuan dan agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, kemudian direkomendasikan untuk memperoleh bantuan bergulir” (wawancara 11 September 2013)

Kabupaten Pasir melalui proyek pembinaan dan Pengembangan Perekonomian Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Pasir bekerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Jakarta melaksanakan pelatihan-pelatihan untuk petani, sehingga diharapkan lebih terampil dalam melaksakan dan mengembangkan kegiatan usahanya. Menurut penjelasan dari pimpro pada saat diwawancarai menjelaskan bahwa : “untuk dapatnya program ini berjalan secara baik, maka kami memberikan pelatihan dan pembinaan kepada masing-masing kelompok atau perorangan yang mengajukan kredit. Pelatihan dan pembinaan ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan bekal pengetahuan kepada petani/nelayan baik secara teoritik maupun praktek, agar petani/nelayan lebih meningkat kemampuan, hasil dan pendapatannya,

sehingga kesejahteraannya akan dapat meningkat” (wawancara 13 September 2013)

Bantuan dana bergulir/modal bergulir baik dalam bentuk uang yang disalurkan berupa kredit maupun untuk memperoleh sarana produksi dirasakan sangat membantu petani/kelompok tani dalam melaksanakan kegiatan usahanya terlebih lagi adanya program pelatihan, sehingga bantuan dana bergulir/modal bergulir dimanfaatkan atau dikelola dengan sebaik-baiknya. Hasil ini sebagaimana penjelasan dari salah satu warga yang mendapat bantuan dana bergulir/modal bergulir bahwa : “Bantuan dana bergulir/modal bergulir yang saya terima dapat menambah usaha saya berjalan lancar dan tentunya merasa senang. Saya menggunakan bantuan tersebut sesuai dengan keperluan saya, dan saya juga aktif (tempat waktu) mengembalikan/membayar angsuran sesuai jadwal (jatuh tempo) dan berusaha agar saya tetap berjalan dan meningkat” (wawancara 15 September 2013)

Selanjutnya guna memotivasi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program, peranan PPL sangat penting sekali dalam pelaksanaan program, peranan PPL sangat penting sekali dalam memberikan pembinaan untuk keberhasilan program. Sasaran yang ingin dicapai dari program ini adalah meningkatnya kemampuan usaha, pendapatan, kemandirian, kesadaran dan tanggung jawab masyarakat pada diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. Terbentuknya pranata kesejahteraan sosial yang memberikan jaminan sosial kepada penduduk miskin, sedangkan sasaran akhir adalah semakin berkurangnya penduduk miskin di Kabupaten Pasir dalam setiap tahunnya.

Perkembangan Penyaluran Dana Bergulir

Sebagai upaya untuk menanggulangi dampak krisis ekonomi, pemberdayaan masyarakat sebagai suatu bentuk kekuatan yang harus dimunculkan merupakan suatu tugas yang tidak mudah. Peranan pemerintah, lembaga non pemerintah dan masyarakat sebagai subjek yang diperdayakan perlu melakukan kerjasama yang baik agar diperoleh hasil yang baik pula dan memuaskan. Tugas mengembangkan dan memperdayakan manusia, masyarakat, dan lingkungan hanya akan dapat di emana dengan baik apabila sistem itu memiliki tenaga pengelola yang kuat, utuh, dinamis, dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai dengan keperluan. Semua tenaga pengelola ini perlu memiliki kemampuan melaksanakan tugas masing-masing agar proses pemberdayaan masyarakat dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan tujuan pemerintah.

Program penyaluran kredit/dana bergulir yang implementasinya sejak tahun 1998 hingga tahun 2013 mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini untuk memenuhi permohonan masyarakat yang semakin meningkat setiap tahunnya, baik masyarakat yang sudah pernah mendapatkan bantuan dana bergulir dan kegiatan usahanya meningkat sehingga mampu melunasi

pengembaliannya tepat waktu sesuai jadwal, maupun masyarakat yang belum pernah mendapatkan bantuan dana bergulir. Seperti yang dikatakan warga yang pernah mendapatkan bantuan dana bergulir/modal bergulir bahwa :“dulu saya pernah mendapatkan bantuan dana bergulir/modal bergulir dan alhamdulillah kegiatan usaha saya berjalan lancar dan meningkat dan saya telah mengembalikan/melunasi angsuran sesuai jadwal (jatuh tempo) dan saya mengajukan permohonan kembali agar saya dapat lebih meningkat”

Dari penjelasan tersebut di atas, dapatlah diketahui mengingat besarnya manfaat yang dirasakan oleh para peminjam dana bergulir/modal bergulir maka banyak para peminjamnya mengajukan permohonan kembali untuk mendapatkan bantuan dana bergulir.

Pengendalian Penyaluran Dana Bergulir

Keberhasilan pembangunan ekonomi harus didukung oleh perencanaan dan pelaksanaan di bidang yang lain. Kebijakan pembangunan ekonomi ditujukan untuk mempertinggi kesejahteraan dalam arti yang seluas luasnya, kegiatan pembangunan ekonomi selalu dipandang sebagai sebagian dari keseluruhan usaha pembangunan yang dijalankan oleh suatu masyarakat. Pembangunan ekonomi hanya meliputi usaha masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan mempertinggi tingkat pendapatan masyarakatnya, sedangkan keseluruhan usaha-usaha pembangunan meliputi usaha-usaha pembangunan sosial, politik, dan kebudayaan.

Tim Pengendalian Dana Bergulir Kredit Usaha Mikro dan Sarana Produksi tersebut setiap bulannya mengadakan rapat untuk mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan dan perkembangan penyaluran kredit/dana bergulir, kemudian menentukan langkah-langkah yang akan dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh Ketua Pelaksana Tim Pengendalian Dana Bergulir Kredit Usaha Mikro dan Sarana Produksi yaitu :“untuk mengendalikan dan mengontrol pelaksanaan program dana bergulir kredit usaha mikro dan sarana produksi kami setiap bulan selalu mengadakan pertemuan. Pertemuan ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program serta kendala-kendala apa yang ditemui guna dicari solusi dan jalan pemecahannya” (wawancara 15 September 2013).

Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa program dana bergulir cukup berhasil memberi manfaat bagi penerima bantuan hal ini terlihat dari tingginya kesesuaian peruntukan bantuan dan banyaknya pembinaan. Adanya penerimaan yang tetap dan menurun lebih mungkin disebabkan kurangnya kuantitas bantuan (*plafond bantuan*) per individu penerima, jika tidak dimungkinkan adanya peningkatan *plafond bantuan*, maka informasi tersebut

sehrusnya telah dimiliki oleh instansi/lembaga terkait. Meskipun kuantitas bantuan dirasa kurang tetapi digunakan untuk keperluan usaha.

Secara teoritis dapatlah dikatakan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan kredit dana bergulir dapatlah dikatakan berhasil, karena kebijakan tersebut mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Dampak kebijakan yang diartikan oleh Wibawa (1994:5) sebagai perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari output kebijakan. Sedangkan output kebijakan itu sendiri adalah barang atau jasa atau fasilitas lain yang diterima oleh sekelompok masyarakat tertentu, baik kelompok sasaran maupun kelompok lain yang tidak dimaksudkan untuk disentuh oleh kebijakan.

Dalam implementasi program dana bergulir ini output yang dimaksud adalah seluruh warga masyarakat di Kabupaten Pasir baik yang memanfaatkan program kredit dana bergulir maupun yang belum memanfaatkannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan dari program ini terbukti dari banyaknya warga masyarakat yang sudah pernah mendapatkan bantuan kredit bergulir yang mengajukan lagi untuk mendapatkannya. Namun demikian agar asas pemerataan dapat terwujud dalam kegiatan program ini maka para masyarakat yang mengajukan lebih diprioritaskan pada masyarakat miskin yang belum pernah mendapatkan bantuan kredit dana bergulir.

Penutup

Kesimpulan

Dari hasil penelitian serta pembahasan tersebut di atas, maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan adalah :

Kondisi yang menekan

Sesuatu diluar diri pemimpin/menejer mungkin saja tidak dapat dielakkannya, sehingga sebagai pengambil keputusan/pembuatan kebijakan tidak dapat lain daripada harus menyesuaikan keputusan/kebijakannya dari tekanan dari luar tersebut.

Institusi/peraturan

Pemimpin/manajer dalam mengambil keputusan/pembuatan kebijakan dibatasi oleh bidang kerja organisasi atau unit/satuan kerja dalam kedudukannya sebagai organisasi non profit, diantaranya sebagai lembaga pemerintahan yang telah menetapkan berbagai peraturan pembagian tugas dalam memberikan pelayanan umum dan melaksanakan pembangunan antar semua lembaga.

Kepribadian dan Inteligensi.

Sifat-sifat atau karakteristik kepribadian seseorang pimpinan/manajer sangat besar pengaruhnya terhadap kualitas keputusan/kebijakan yang ditetapkannya. Pemimpin/manajer yang memiliki sifat introvers akan berbeda dalam mengambil keputusan/kebijakan dengan yang bersifat ekstroverts.

Kualitas Informasi/Data

Keputusan/kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan/manajer tidak saja dipengaruhi oleh kecukupan data/informasi, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, sebagaimana telah dijelaskan dalam spektrum pengambilan keputusan/kebijakan diatas.

Pertimbangan politik

Pengaruh politik dalam negeri (nasional/domestik) dan luar negeri (global/internasional) yang diimplementasikan oleh pemerintah/negara sebagai organ isasi non profit, sangat besar pengaruhnya terhadap para pimpinan/manajer dalam mengambil dan menetapkan keputusan/kebijakan, terutama dalam usaha melaksanakan sistem pendidikan nasional secara operasional

Tingkat Kedisiplinan Alternatif Yang Dipilih

Dalam mengambil keputusan atau pembuatan kebijakan di lingkungan organisasi non profit, setiap pimpinan dari yang tertinggi sampai yang terendah, menginginkan keputusan yang tingkat ketepatan/kepastiannya tinggi, agar tidak keliru dan gagal jika di implementasikan. Sebaliknya para pimpinan/manajer cenderung untuk tidak menetapkan keputusan/kebijakan yang tingkat kepastian/ketepatan nya rendah, baik yang prosesnya di programkan maupun tidak diprogramkan.

Nilai-Nilai

Pimpinan/manajer yang berwenang dan bertanggung jawab dalam menetapkan keputusan/kebijakan, pada hakikat nya adalah manusia sebagai makhluk normatif, yang hidup di dalam dan dengan nilai-nilai yang dijadikan pandangan dan pedoman hidupnya.

Implementasi kebijakan dana bergulir dari tahun ke tahun meningkat dan cukup berhasil memotivasi masyarakat agar lebih berdaya dan lebih mandiri, karena sebelum mendapat bantuan dana bergulir masyarakat telah dibekali pengetahuan usaha dan pelatihan, sehingga masyarakat mampu dan terampil dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Dalam implementasi kebijakan dana bergulir diperlukan adanya pengendalian penyaluran dana bergulir agar pelaksanaannya sesuai dengan tujuan yaitu untuk membanatu perekonomian setiap warga yang mendapatkan

bantuan dan masyarakat memanfaatkan bantuan dana bergulir dengan sebaik-baiknya, sehingga kegiatan usahanya meningkat, karena hal ini mempunyai dampak yang sangat luas terhadap pembangunan perekonomian daerah, pertumbuhan dan perkembangan perekonomian yang terus meningkat pada akhirnya mengurangi kemiskinan dan bahkan dapat mengeliminasi kemiskinan;

Dengan implementasi kebijakan dana bergulir ini secara keseluruhan memberikan dampak bagi peningkatan penerimaan dan kemajuan usaha. Selain itu kebijakan dana bergulir ini juga telah meningkatkan bargaining position bagi masyarakat.

Saran

Mengingat makin meningkatnya permohonan masyarakat terhadap bantuan dana bergulir yang diimbangi dengan meningkatnya dana bergulir dalam setiap tahunnya, maka agar lebih efektif dan efisien disarankan perlu adanya lembaga independen tersendiri yang mengelolanya agar dalam pelaksanaannya dapat lebih profesional.

Peran dari lembaga teknis sebagai penanggung jawab dalam proses penyaluran kredit/dana bergulir perlu lebih dioptimalkan, baik pembinaan administrasi maupun teknis, sehingga program yang dilaksanakan dapat berjalan lancar dan berkesinambungan.

Efektifitas pengendalian penyaluran dana bergulir hendaknya lebih ditingkatkan, agar permasalahan yang timbul dilapangan dapat segera teratasi dan tidak berlarut-larut sehingga tidak muncul persepsi yang negatif.

Daftar Pustaka

- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Social*. Surabaya: Airlangga University Press
- Bungin, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Dewanta, Awan Setya, et all, 1995, *kemiskinan dan kesenjangan di indonesia*, Aditya
- Fredmann, jhon, 1992 *Empowermen: The Politics of Alternative Development*, Cambridge mass, blackwel publisher
- Gunawan, Sumodiningrat 1998, *strategi pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan*, Materi Kuliah Umum Pascasarjana universitas Briwijaya, Malang
- Maleong,lexy j, 1988, *metedologi penelitian* , PT.Remaja Rosdakarya, Bandung

Nawawi Hadari , 2003, *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan* ,Guru Besar Utama, Universitas Terbuka

SUMBER Oktober 2013

<http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2177548-konsep-dan-definisi-kemiskinan/>

<http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2159711-pengertian-usaha/>

<http://ekhardhi.blogspot.com/2010/12/pendapatan-biaya-usaha-kecil.html>

Sumber <http://h0404055.wordpress.com/2009/12/02/pengertian-kemiskinan/>